



PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN BI RATE TERHADAP PENYALURAN KREDIT DI INDUSTRI PERBANKAN

Sabaruddin Siagian
Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 Maret 2021, disetujui: 30 April 2021)

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of third party funds (DPK) and the BI Rate on bank lending. The population in this research is banks in the Indonesian banking industry. While the sample uses conventional commercial banks (BUK). The research data also used the classical assumption test, especially the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. The research results show that simultaneously there is a positive and significant effect of third party funds (TPF and the BI Rate on bank lending. Partially, there is a positive and significant effect of third party funds (TPF) on bank loans. And, partially there is also a positive and significant effect of the BI Rate on lending.

Keywords: *Third Party Funds, BI Rate and Credit.*

Abstrak

Maksud dari riset ini untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan BI Rate terhadap penyaluran kredit perbankan. Populasi dalam riset ini adalah bank - bank di industri perbankan Indonesia. Sedangkan sampel memanfaatkan bank bank umum konvensional (BUK). Data riset tersebut juga menggunakan uji asumsi klasik, khususnya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil riset menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga (DPK) dan BI Rate terhadap penyaluran kredit perbankan. Secara parsial, ada pengaruh positif dan signifikan dari dana pihak ketiga (DPK) terhadap kredit bank. Dan, secara parsial juga terdapat pengaruh positif dan signifikan dari BI Rate terhadap penyaluran kredit.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga, BI Rate dan Kredit

I. PENDAHULUAN

Peranan industri perbankan dalam perekonomian sangat strategis karena peranan industri perbankan tersebut sangat besar dalam membiayai perekonomian

negara. Peranannya yang sangat besar itu dalam membiayai perekonomian karena industri perbankan itu memiliki fungsi sebagai lembaga perantara atau intermediasi pendanaan dalam sebuah perekonomian negara. Industri

perbankan menjadi lembaga perantara karena perannya mampu menghimpun dana dari pihak yang surplus untuk disalurkan ke pihak yang defisit. Kemampuan industri perbankan Indonesia cukup baik dalam membiayai dana pembangunan nasional dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, antara 5 persen sampai 7 persen, sehingga meningkatkan pembangunan yang pesat sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini dan juga meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia, menjadi pendapatan menengah tinggi saat ini.

Daya dorong industri perbankan Indonesia dalam membiayai pembangunan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tecermin kemampuan industri perbankan Indonesia menghimpun dana pihak ketiga atau DPK dan kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai pada September 2020, industri perbankan Indonesia sudah mampu menghimpun dana pihak ketiga atau DPK mencapai Rp 6.339 triliun. Sedangkan kemampuan industri perbankan Indonesia dalam menyalurkan dana kredit kepada masyarakat dan dunia usaha sudah mencapai Rp5.290 triliun.

Laju pertumbuhan DPK dan kredit untuk mendorong pembiayaan dana pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi didukung juga kemampuan bank sentral kita, Bank Indonesia (BI), dalam menciptakan stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan ruang kepada Industri perbankan Indonesia bertumbuh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Piranti atau instrumen yang digunakan oleh BI dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh dan berkelanjutan serta mendorong Industri perbankan dalam membiayai perekonomian Indonesia adalah suku bunga acuannya, BI Rate. BI mampu menciptakan stabilitas moneter yang kondusif dengan memberikan tingkat suku bunga BI Rate yang mampu menyelaraskan kebutuhan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan industri perbankan, khususnya pertumbuhan DPK dan penyaluran kredit perbankan.

Akselerasi peranan industri perbankan dalam membiayai dana perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi sudah banyak rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan berbagai institusi pendidikan dan lem-

baga penelitian, khususnya terkait dengan variabel kredit, DPK dan BI Rate.

Untuk konsteks ini, penelitian ini ingin menguji pengaruh penghimpunan dana DPK terhadap kredit di industri perbankan Indonesia dan pengaruh BI Rate terhadap kredit. Memang harus diakui rekomendasi-rekomendasi hasil kesimpulan penelitian -penelitian pengaruh DPK terhadap kredit di Indonesia didominasi kesimpulan-kesimpulan bahwa terdapat DPK terhadap kredit.

Dalam penelitian ini untuk memastikan kesimpulan hasil penelitian pengaruh DPK terhadap kredit yang berlaku di Industri perbankan. Dan mengetahui bagaimana instrumen moneter yang dimiliki Bank Indonesia, BI Rate, bertransmisi terhadap perubahan penyaluran kredit. Dengan mengetahui pengaruh DPK terhadap kredit perbankan dan pengaruh BI Rate terhadap kredit, maka pihak industri perbankan dapat memanfaatkan temuan-temuan riset ini untuk membuat kebijakan dan strateginya dalam melaksanakan bisnisnya, khususnya mengelola penyaluran kreditnya.

Banyak sudah hasil rekomendasi hasil penelitian pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit di berbagai segmen industri atau di berbagai segmen bagian-bagian industri perban-

kan Indonesia. Antara lain lain penelitian-penelitian pengaruh DPK terhadap kredit di segmen bank-bank tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), bank non devisa, bank devisa, bank BUMN, bank BPD, bank kelompok tertentu berdasarkan aset dan modal, dan juga berdasarkan daerah tertentu. Semua hal ini adalah penelitian – penelitian ini dengan sampel terbatas dan selektif.

Standing atau sikap dalam penelitian ini terkait pengaruh DPK terhadap kredit dan pengaruh BI Rate terhadap kredit dengan menggunakan sampel yang besar dengan memanfaatkan seluruh bank umum konvensional (BUK) yang terdapat di industri perbankan Indonesia. Sehingga temuan – temuan dalam riset ini menjadi rujukan yang berlaku di industri perbankan Indonesia.

Selain menggunakan sampel besar sehingga mampu menjelaskan kondisi sebenarnya terkait variabel DPK, BI Rate dan kredit, juga untuk riset ini memanfaatkan analisis yang dalam dan detail sehingga pelaku industri perbankan dan para pengguna temuan-temuan penelitian tahu detail juga tentang pengaruh dana DPK terhadap kredit dan pengaruh BI Rate terhadap kredit perbankan.

Dalam membuat penelitian yang berkualitas dan memenuhi standar prosedur pe-

nelitian yang benar dan mengetahui informasi-informasi yang terkait variabel DPK, BI Rate dan kredit yang utuh dan lengkap, maka sangat diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh DPK terhadap kredit dan pengaruh BI Rate terhadap kredit. Dan selanjutnya akan diberikan secara lengkap hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait variabel dana DPK, BI Rate dan kredit.

Hasil kesimpulan penelitian terkait dengan pengaruh dana DPK terhadap kredit yang hasilnya ada berpengaruh positif dan signifikan, antara lain, (Oktaviani, 2012), (Sitanggang, 2015), (Darmawan, 2017), (Gift et al., 2016), (Pratama, 2009), (Suwandi, 2016), (Siahaan, 2019), (Pujiyanti, 2010), (Natanael, 2011), Penelitian-penelitian yang hasil kesimpulannya tidak ada pengaruh DPK terhadap kredit, antara lain, (Melinda et al., 2021), (Pratiwi & Prajanto, 2020).

Selanjutnya memberikan hasil penelitian-penelitian BI Rate pengaruhnya terhadap kredit. Terkait BI Rate pengaruhnya terhadap kredit, terjadi perbedaan hasil kesimpulan penelitian-penelitian atau gap research yang sangat besar.

Riset-riset yang menegaskan terdapat pengaruh negatif dan signifikan BI Rate terhadap kredit, antara lain, (Ferdyan, 2012),

(Pujiyanti, 2010), (Natanael, 2011), (Astuti, 2013), (Oktaviani, 2012). Dan juga ditemukan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dominan bahwa adanya pengaruh BI Rate terhadap kredit positif dan signifikan, antara lain, (Sari, 2013), (Darmawan, 2017), (Suwandi, 2016), (Siahaan, 2019). Serta hasil - hasil penelitian yang sebelumnya menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh atau tidak signifikan baik yang arah positif dan negatif BI Rate terhadap kredit, antara lain, (Sitanggang, 2015), (Gift et al., 2016).

II. KAJIAN TEORI

Kredit Perbankan

Menurut (Siagian, 2020b), ada dua hal utama yang menjadi fungsi utama perbankan, pertama, penyimpanan dari dana masyarakat yang surplus. Dana simpanan masyarakat itu ditempatkan bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, bank sebagai lembaga penyaluran dana yang diberikan ke masyarakat. Penyaluran dana tersebut disebut dengan kredit.

Menurut (Kasmir, 2002), “Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu credere artinya percaya. Alasan kepercayaan kepada bank adalah karena ia memiliki kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit yang diberikan itu akan dikembalikan sesuai pengaturannya, sedangkan untuk penerima kredit itu adalah

pemberian kepercayaan sehingga penerima kredit tersebut memiliki komitmen untuk membayar seperti yang ditunjukkan oleh kerangka waktu yang disepakati bersama”.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali dalam bentuk kredit. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat itu disebut dengan dana pihak ketiga atau DPK perbankan. Dana pihak ketiga (DPK) tersebut terdiri 3 macam, yakni, giro, tabungan dan deposito.

Giro adalah simpanan yang dapat dipindahkan kapan saja melalui cek, bilyet giro, berbagai metode untuk permintaan cicilan atau dengan pindah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati namun tidak bisa melalui cek, bilyet giro, dan / atau cara serupa lainnya. Lebih lanjut, Depositi adalah simpanan yang penarikannya harus dilakukan pada waktu tertentu tergantung pada kesepakatan antara klien dan bank.

BI Rate

Dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas moneter dan yang membengkak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia (BI) memiliki instru-

men, khususnya bunga pinjaman, yaitu BI Rate. BI Rate adalah suku bunga pinjaman berjangka pendek, dengan tenor 7 hari, yang ditukarkan oleh BI di pasar uang.

(Siagian, 2020a) mengatakan, “BI akan menaikkan suku bunga acuannya, BI Rate, jika inflasi meningkat. Dan akan mempengaruhi atau bertransmisi terhadap suku bunga kredit perbankan dan selanjutnya perbankan menaikkan suku bunga kreditnya. Pada akhirnya dengan menaikkan suku bunga kredit dapat menurunkan permintaan terhadap penyaluran kredit. Sebaliknya BI akan menurunkan suku bunga acuannya, BI Rate, jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, Tentu akan bertransmisi terhadap suku bunga kredit perbankan dan selanjutnya menurunkan suku bunga kredit perbankan. Akhirnya ada peningkatan permintaan kredit perbankan”.

Kerangka Teori

A. Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Kredit

Dalam rangka membuat hipotesis – hipotesis yang kredibel dan yang memiliki argumentasi-argumentasi yang kuat, maka diperlukan kajian teori – teori dan hasil – hasil penelitian sebelumnya. Dalam hal ini akan diberikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis -hipotesis yang dibuat.

Menurut (Oktaviani, 2012), dengan menggunakan data bank-bank go public, terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap kredit. (Sitanggang, 2015) dalam hasil penelitiannya dengan memanfaatkan data bank BUMN yang terdaftar di Bursa BEI, menegaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap kredit. Begitu juga menurut (Darmawan, 2017), dengan menggunakan data bank umum konvensional, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap kredit.

Menurut (Pratama, 2009), dengan studi pada bank umum konvensional, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap kredit. Begitu juga menurut (Siahaan, 2019), dengan penelitian di bank – bank Sumatera Utara, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap kredit. Serta menurut (Gift et al., 2016), dalam penelitiannya bank BPR di Provinsi Riau, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap kredit.

Riset-riset sebelumnya yang lain menghasilkan ada pengaruh DPK terhadap kredit yang menguatkan hasil-hasil riset yang dipaparkan di atas, antara lain, (Pujiyanti, 2010), (Natanael, 2011). Atas dasar hasil riset-riset

yang dipaparkan di atas dibuatlah hipotesis pertama (H1):

H1: Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap penyaluran kredit positif dan signifikan.

B. Pengaruh BI Rate terhadap penyaluran kredit perbankan

Secara teori ada pengaruh BI Rate, terhadap kredit yang negatif. Bila BI Rate meningkat, kredit menurun karena permintaan kepada surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) meningkat. Akhirnya mengurangi dana untuk penyaluran kredit. Dan sebaliknya berlaku bila BI Rate menurun, maka penyaluran kredit perbankan akan meningkat.

Untuk menguatkan teori tersebut, dipaparkan hasil – hasil penelitian sebelumnya. Menurut (Pujiyanti, 2010), dengan studi pada bank – bank umum, bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan BI Rate terhadap kredit. (Natanael, 2011), dalam penelitian pada studi bank BUMN, menghasilkan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan BI Rate terhadap penyaluran kredit perbankan.

(Ferdyan, 2012), dalam studi empiris pada bank BUMN, bahwa terdapat positif dan signifikan BI Rate pengaruhnya terhadap penyaluran kredit perbankan. Serta, menurut (Astuti, 2013), dengan studi penelitian 10

besar bank berdasarkan kredit, bahwa terdapat negatif dan signifikan pengaruhnya BI Rate terhadap kredit.

Merujuk riset-riset sebelumnya yang dipaparkan maka dapat diambil hipotesis kedua (H2) sebagai berikut:

H2: Ada pengaruh negatif dan signifikan BI Rate terhadap kredit perbankan.

III. METODE PENELITIAN

Macam dan Basis Data Riset

Informasi yang digunakan dalam riset ini adalah data sekunder. Informasi diperoleh dari laporan Bank Indonesia (BI) dan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi tersebut dikumpulkan melalui situs atau situs BI, www.bi.go.id, dan situs OJK, www.ojk.go.id. Informasi data yang diambil adalah ringkasan dalam kurun waktu triwulanan periode 2015-2019.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam riset ini memanfaatkan data perbankan Indonesia. Sedangkan sampel yang diambil adalah 110 bank yang terdaftar di OJK menyangkut kredit bank, dana pihak ketiga (DPK) dan BI Rate yang diambil dari BI dengan kurun waktu tahun 2015-2019.

Uji Asumsi Klasik

(Sujarweni, V. Wiratna & Utami, 2019) mengatakan, “Bila penelitian menggunakan

uji hipotesis regresi linier, diharuskan melakukan dulu uji klasik sebelum digunakan untuk kepentingan data penelitian. Uji klasik tersebut antara lain, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi”.

Menurut (Santoso, 2018), “uji normalitas ialah uji mengetahui apakah data penelitian tersebut terdistribusi normal atau tidak. Uji multikolinieritas ialah uji apakah variabel-variabel independen saling berkorelasi atau tidak. Dan, uji autokorelasi ialah untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada waktu tertentu dengan variabel sebelumnya”.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda pada riset ini:

$$Y = a + \beta_1 \text{ DPK} + \beta_2 \text{ BI Rate} + e$$

$$Y = \text{Kredit}$$

$$a = \text{Konstanta}$$

$$\beta = \text{Koefisien regresi}$$

$$\text{DPK} = \text{Dana pihak ketiga perbankan}$$

$$\text{BI Rate} = \text{Suku bunga acuan Bank Indonesia}$$

$$e = \text{Residual atau error.}$$

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menerangkan tingkat faktor variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel tidak bebas.

Uji F

Uji F, menguji bagaimana variabel bebas atau variabel indenpenden mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.

Uji t

Uji parsial (uji t) atau untuk menguji setiap variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

IV. HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dengan memanfaatkan SPSS 25 dalam menguji normalitas data riset dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, menghasilkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Karena hasil Asymp. Sig (2-tailed) adalah nilai signifikasinya yang sebesar $0,200 > 0,05$.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		19
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	48,98317600
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,142
	Negative	-,120
Test Statistic		,142
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Uji Multikolinieritas

Acuan uji multikolinieritas diterima jika variance inflation factor (VIF) berada diantara 1 s/d 10. Berdasarkan perhitungan VIF yang diolah SPSS 25 didapatkan VIF DPK = 1,338 dan VIF BI Rate= 1,338. Dengan hasil VIP kedua variabel tersebut maka data penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DPK	,747	1,338
	BI Rate	,747	1,338

a. Dependent Variable: Kredit

Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan uji Glejser, kita menguji uji heteroskedastisitas data penelitian. Karena hasil olahan data riset dengan memanfaatkan SPSS 25 hasilnya adalah DPK sebesar $0,176 > 0,05$ dan BI Rate sebesar $0,956 > 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, atau data penelitian terjadi penyebaran dan tidak berpola.

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,416	,176
	DPK	-1,416	,176
	BI Rate	-,056	,956

a. Dependent Variable: Abs_Res

Uji Outokorelasi

Dengan menggunakan model Durbin-Watson, kita menguji outokorelasi data riset. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,791. Nilai tersebut masih berada pada range nilai antara -2 sampai 2. Makanya pada data penelitian tidak terjadi autokorelasi.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,996 ^a	,991	,990	51,955	1,791

a. Predictors: (Constant), BI Rate, DPK

b. Dependent Variable: Kredit

Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda data riset sebagai berikut:

Coefficients^a

		Unstandardized B	t	Sig.
1	Constant)	-1686,054	-8,590	,000
	DPK	1,201	39,153	,000
	BI Rate	47,670	3,912	,001

a. Dependent Variable: Kredit

Persamaan linier berganda pada data riset ini:

$$\text{Kredit} = -1.686,054 + 1,201 \text{ DPK} + 47,670 \text{ BI Rate} + e$$

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Dana pihak ketiga (DPK) dan BI Rate secara simultan mampu mempengaruhi penyaluran kredit perbankan. Hal ini tecermin uji F atau uji pada data riset $0,00 < 0,05$

ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	932,777	,000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Kredit

b. Predictors: (Constant), BI Rate, DPK

Hasil uji koefisien determinasi dari data penelitian itu, di mana R Square sebesar 0,991. Hasil ini mengartikan bahwa penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh DPK dan BI Rate sebesar 99,1 persen. Dan sisanya 0,9 persen penyaluran kredit perbankan dipengaruhi faktor lain yang belum diteliti pada riset ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

1. Pengaruh dana pihak ketiga atau DPK terhadap penyaluran kredit.

Koefisien regresi (beta) positif 0,000. Nilai signifikasi $0,000 < 0,05$ maka terdapat pengaruh positif signifikan DPK terhadap penyaluran Kredit. Dengan demikian hipotesis (H1) diterima, terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap penyaluran kredit.

2. Pengaruh BI Rate terhadap penyaluran kredit.

Koefisien (beta) positif sebesar 0,001. Karena nilai signifikasi $0,001 < 0,05$, maka ada pengaruh positif dan signifikan BI Rate terhadap kredit perbankan. Maka dengan hipotesis (H2) ditolak yang menjelaskan ada pengaruh negatif dan signifikan pengaruh BI Rate terhadap kredit.

Pembahasan

Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap penyaluran kredit.

Temuan dari riset ini terdapat positif dan signifikan pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit perbankan. Maka, hipotesis (H1) diterima. Artinya di industri perbankan Indonesia bahwa setiap penambahan DPK maka akan menambah penyaluran kreditnya. Dengan menghimpun DPK dari masyarakat memerlukan biaya dana dari DPK itu maka DPK akan segera disalurkan berupa kredit untuk membiaya dana DPK dan membiaya operasional bank dan menghasilkan laba bank tersebut. Sehingga demikian, perubahan penambahan DPK maka akan direspons juga kenaikan penyaluran kredit perbankan.

Seperti diketahui bahwa industri perbankan memiliki fungsi intermediasi, sebagai berfungsi menghimpun DPK dan juga berfungsi penyalurkan DPK tersebut. Tentu perbankan memaksimalkan kedua fungsi tersebut untuk memaksimalkan laba dan nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis (H1) dapat diterima dalam industri perbankan Indonesia.

Dengan melihat hasil riset ini terdapat pengaruh signifikan dan positif DPK terhadap kredit maka perbankan telah melaksanakan fungsi utamanya yang baik, yakni menjalankan

fungsi intermediasi atau penyaluran dana dalam bentuk kredit. Industri perbankan Indonesia berarti juga menempatkan dana-dananya yang bersumber dari masyarakat ini ke aktiva produktif yang menghasilkan margin keuntungan kepada perbankan itu.

Artinya juga bahwa perbankan Indonesia mampu menempatkan dana yang didapat dari masyarakat lalu disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan tidak ditempatkan ke aset non kredit berupa penempatan deposito di perbankan juga, penempatan dana jangka pendek di institusi keuangan, pembelian surat-surat berharga berupa saham dan obligasi institusi keuangan dan non institusi keuangan.

Sangat kuatnya perbankan menempatkan dananya ke dalam bentuk kredit tecermin pada data bank umum konvensional (BUK) Indonesia pada September 2020. Pada periode tersebut data penyaluran kredit BUK sebesar Rp 5.290 triliun, sedangkan data dana pihak ketiga atau DPK BUK sebesar Rp 6.339 triliun. Ini berarti selisih dari DPK dengan kredit hanya Rp 1.049 triliun portofolio dana atau aset perbankan Indonesia digunakan untuk kebutuhan likuiditas perbankan dan diversifikasi aset dan dana perbankan.

Berdasarkan temuan riset ini, ada pengaruh DPK terhadap kredit yang positif dan signifikan, dan data keuangan finansial terkait data penyaluran kredit dan DPK BUK Indonesia menegaskan bahwa perbankan Indonesia sangat memaksimalkan peranan utamanya, menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Dampak dari kemampuan perbankan memaksimalkan fungsinya dalam menyalurkan kreditnya meningkatkan industri-industri berbagai sektor-sektor ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia, menjadi mendapatkan pendapatan menengah tinggi.

Harus diakui bahwa serapan kredit di Indonesia sangat tinggi karena dibutuhkan dalam membiayai dunia usaha dan memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti diketahui Indonesia saat ini dalam kondisi negara tahap sedang membangun segala bidang. Hal ini tecermin pada pertumbuhan penyaluran kredit dan pertumbuhan yang konsisten meningkat dan berkesinambungan. Karena proses tahapan pembangunan yang deras tentu setiap ada penawaran kredit dari industri perbankan langsung diserap dunia usaha. Kendati suku bunga yang ditawarkan perbankan Indonesia sangat tinggi.

Menurut (Suwandi, 2016) suku bunga kredit tidak sensitif terhadap penyaluran kredit. Tapi dominan penentu penyaluran kredit kemudahan dari syarat-syarat kredit tersebut. Ini artinya dorongan permintaan kredit sangat tinggi di Indonesia dalam membiayai pembiayaan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat tanpa mempertimbangkan risiko pembayaran angsuran kredit tersebut.

Dorongan permintaan kredit sangat besar itu sangat diapresiasi karena akan memacu pembangunan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi ada risiko krisis perbankan terjadi seperti krisis perbankan tahun 1998. Krisis perbankan ini memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Kasus krisis perbankan tahun 1998 dikarenakan sangat derasnya penyaluran kredit dari sektor perbankan tanpa pengawasan kuat dalam menyalurkan kredit tersebut. Akibat derasnya penyaluran kredit tersebut dan sangat lemahnya pengawasan dari otoritas perbankan, dalam hal Bank Indonesia saat itu, mengakibatkan kualitas sangat dari kredit perbankan Indonesia.

Ketika terjadi krisis moneter atau krisis nilai tukar rupiah memberi dampak pukulan telak terhadap kualitas kredit perbankan Indonesia. Kualitas kredit perbankan turun drastis

diterpa krisis moneter karena lemahnya sistim pengawasan perbankan Indonesia. Akibat sangat buruknya kualitas kredit tersebut membuat setengah perbankan Indonesia ditutup atau dilikuidasi dan dimerger.

Biaya dalam memulihkan atau menyelamatkan perbankan dengan memperbaiki kualitas kredit perbankan, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana obligasi rekapitulasi untuk mengeluarkan kualitas kredit yang sangat buruk itu. Biaya obligasi rekapitulasi dalam menyehatkan perbankan sebesar Rp650 triliun dan biaya pemulihan ekonomi di sektor non perbankan sebesar Rp 350 triliun. Jadi total biaya pemulihan perekonomian Indonesia tahun 1998 totalnya mencapai Rp 1.000 triliun. Bila dibandingkan menggunakan pendapatan domestik bruto atau PDB, biaya pemuliharaan krisis perekonomian kita terbesar di dunia. Hal ini bisa terjadi karena perbankan kita sangat massif menyalurkan kredit atau permintaan kepada kredit sangat besar tapi lemahnya dalam pengawasan perbankan.

Kendati ada perbaikan dalam pengawasan perbankan pasca krisis perbankan tetapi masih terjadi kelemahan sistim pengawasan perbankan. Hal ini tecermin pada data yang bank bermasalah saat ini masih 7 bank masih mengalami masalah, yakni, Bank Muamalat,

Bank Bukopin, Bank Mayapada, Bank Papua, Bank Tabungan Negara (BTN, Bank Yudha Bhakti dan Bank Pembangunan Daerah Banten. Melihat data bank-bank bermasalah tersebut perlu peningkatan sistim pengawasan yang lebih kuat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Supaya perbankan kita kuat dari gunjangan dari sisi internal maupun eksternal dan untuk mengurangi potensi risiko krisis perbankan dan ekonomi kembali lagi.

Jadi kemampuan menghimpun DPK dan kemampuan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk penyaluran kredit yang sangat besar dan signifikan maka perlu diapresiasi terhadap pelaku-pelaku industri perbankan itu. Akan tetapi, sangat urgen atau mendesak sekarang ini supaya OJK membangun sistim pengawasan perbankan, khususnya pengawasan kualitas kredit perbankan, yang kuat dan kredibel. Supaya perbankan Indonesia memiliki daya tahan dari berbagai tekanan dan mengurangi risiko maksimal terjadinya krisis perbankan kembali,

Dalam menguatkan temuan riset ini bahwa ada pengaruh DPK terhadap kredit yang signifikan dan positif dikuatkan oleh paparan temuan-temuan peneliti-penelitian lainnya. Dalam penelitian (Pratama, 2009), dengan data industri perbankan Indonesia periode data

riset tahun 2005 sampai 2009, sama hasil kesimpulan penelitian ini dengan hasil kesimpulannya terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap penyaluran kredit di industri perbankan Indonesia. Dalam penelitian studi kasus di berbagai segmen industri perbankan, juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Antara lain, (Siahaan, 2019), dalam penelitiannya di perbankan Sumatera Utara dan (Sitanggang, 2015) dalam penelitian kasus perbankan yang tercatat BEI menghasilkan terdapat positif dan signifikan pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang lain menguatkan hasil riset ini bahwa terdapat positif dan signifikan pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap kredit adalah, antara lain, (Natanael, 2011), (Darmawan, 2017), (Gift et al., 2016), dan (Oktaviani, 2012).

Pengaruh BI Rate terhadap penyaluran kredit.

Dalam riset ini hipotesis (H2) menyatakan terdapat pengaruh negatif dan signifikan BI Rate terhadap kredit perbankan ditolak. Ternyata hasil riset ini menemukan terdapat pengaruh positif dan signifikan BI Rate terhadap penyaluran kredit perbankan.

Dalam teori suku bunga atau interest dinyatakan bahwa bila suku bunga dinaikkan maka penyaluran kredit menurun, sebaliknya

jika suku bunga diturunkan, penyaluran kredit akan meningkat. Teori suku bunga tersebut tidak berlaku di Indonesia. Yang berlaku di Indonesia pada industri perbankan selama periode penelitian adalah ketika suku bunga BI Rate meningkat maka penyaluran kredit perbankan meningkat. Sebaliknya bila suku bunga BI Rate menurun maka terjadi penurunan penyaluran kredit di industri perbankan ini.

Dalam kasus industri perbankan Indonesia, kebijakan instrumen Bank Indonesia (BI), dalam hal ini BI Rate, belum bertransmisi dengan baik terhadap penyaluran kredit perbankan. Standing kebijakan moneter BI belum respons baik terhadap penyaluran kredit perbankan.

Dalam kasus industri perbankan Indonesia, sehingga ada temuan hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan BI Rate terhadap penyaluran kredit perbankan karena perbankan kurang merespons terhadap kebijakan moneter BI. Kurang meresponsnya perbankan terhadap kebijakan moneter BI karena perbankan lebih dominan menggenjot penyaluran kreditnya sehingga meningkat kinerja perbankan, khususnya kinerja laba perbankan.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh BI Rate terhadap kredit terjadi bias atau perbedaan kesimpulan. Perbedaan

kesimpulan penelitian sebelumnya sangat besar. Akan tetapi dalam industri perbankan Indonesia bahwa berdasarkan fakta hasil temuan hasil riset terdapat pengaruh positif dan signifikan BI Rate terhadap kredit perbankan.

Kebijakan moneter terkait dalam hal ini, BI Rate-nya, belum mampu memandukan arah atau peta penyaluran kredit di industri perbankan Indonesia. Pemanduan arah kredit dengan jalur kebijakan moneter Bank Indonesia masih dikalahkan dengan “hasrat” industri perbankan dalam memaksimalkan penyaluran kreditnya.

Atas dasar fakta ini memberikan konsekuensi terhadap perbankan Indonesia, yakni, pertama, akan memaksimalkan penyaluran kredit di industri perbankan. Kedua, meningkatnya risiko industri perbankan dan perekonomian Indonesia. Terkait penjelasan atau paparan pemaksimalan penyaluran kredit sudah dibahas pada bahasan temuan riset yang dijelaskan di atas, pengaruh DPK terhadap kredit. Akan tetapi terkait dengan dampak risiko kurang efektifnya kebijakan moneter Bank Indonesia, BI Rate, perlu pembahasan atau perlu dipaparkan lebih dalam.

Memang di satu sisi berdasarkan temuan riset pertama, pengaruh DPK terhadap kredit, memaksimalkan penyaluran kredit, akan tetapi pemaksimalan kredit tanpa ada panduan dari

jalur kebijakan moneter akan “membahayakan” atau meningkatkan risiko industri perbankan itu sendiri dan perekonomian Indonesia.

Jika panduan dari jalur kebijakan moneter tidak direspons baik, di mana kebijakan moneter Bank Indonesia tidak tertransmisi dengan baik terhadap penyaluran kredit perbankan dapat meningkatkan risiko perbankan dan perekonomian dan pada akhirnya dapat menimbulkan krisis perbankan dan krisis ekonomi pada negara ini. Sangat tingginya jor-joran pemaksimalan penyaluran kredit tanpa memperhatikan panduan-panduan regulator.

Jor-joran pemaksimalan penyaluran kredit yang mana perbankan Indonesia tidak menginginkan otoritas pengawasan perbankan Indonesia, pada saat itu Bank Indonesia, mengakibatkan krisis perbankan dan krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 sangat dalam sekali karena sektor industri perbankan Indonesia porak-poranda, khususnya kerusakan dalam kreditnya. Rusaknya kualitas kredit perbankan ini karena pelaku-pelaku perbankan kurang memperhatikan panduan dari badan pengawasan perbankan.

Kalau krisis perbankan 1998 diakibatkan lemahnya otoritas pengawas perbankan dalam mengawasi ekspansifnya perbankan dalam menyakurkan kreditnya. Tapi pada masa menda-

tang ada potensi krisis perbankan lagi karena perbankan jor-joran ekspansif kredit tanpa memperhatikan panduan yang diberikan Bank Indonesia terkait kebijakan moneter Bank Indonesia, dalam hal ini kebijakan BI Rate-nya.

Untuk itu Bank Indonesia perlu mengkaji kebijakan moneter, BI Rate-nya supaya terjadi transmisi antara kebijakan BI Rate terhadap penyaluran kredit. Dan Bank Indonesia juga harus mempelajari peta perbankan Indonesia dan perilaku-perilaku perbankan Indonesia. Dengan mengkaji kembali kebijakan moneter dan peta perbankan nasional, maka akan mengurangi ketidakefektifan BI Rate terhadap penyaluran kredit. Dalam hal ini BI perlu mengadakan studi lanjutan lebih dalam ketidakefektifan kebijakan BI Rate.

Studi lanjut kebijakan BI Rate ini termasuk juga mempelajari negara-negara lain yang mengalami sama dengan kasus perbankan Indonesia yang mana terjadi rigiditas antara kebijakan BI Rate terhadap penyaluran kredit perbankan. Dengan demikian itu lengkap studi perbankan yang dilakukan Bank Indonesia. Sehingga ke depannya efektif kebijakan BI Rate dalam memandu penyaluran kredit perbankan dapat ditingkatkan sehingga risiko

perbankan dan perekonomian Indonesia dapat dikurangi secara signifikan.

Untuk menguatkan temuan dalam riset ini yang menemukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan BI Rate akan dipaparkan dua studi yang dilakukan oleh (Siahaan, 2019) dan (Suwandi, 2016). Dalam studi (Siahaan, 2019) dengan menggunakan populasi dan responden bank-bank di Sumatera Utara menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan BI Rate terhadap kredit. (Siahaan, 2019) menegaskan dalam penelitiannya pengaruh positif dan signifikan BI Rate terhadap Kredit adalah faktanya dengan menggunakan data penelitian dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Dan temuan studi (Siahaan, 2019) ini bertentangan dengan bunga atau interest.

Yang menarik studi yang dilakukan oleh (Suwandi, 2016) karena studi tersebut menginformasikan dengan lengkap dan dalam pengaruh positif dan signifikan BI Rate terhadap kredit dibandingkan dengan studi-studi yang lain termasuk yang dilakukan oleh (Siahaan, 2019). Studi yang dilakukan di Bank BRI cabang Marauke, Papua, dengan periode tahun 2010 sampai 2014.

Dalam studi (Suwandi, 2016) memberikan istilah kata perilaku “anomali” hubungan antara BI Rate terhadap kredit. Artinya temuan

tersebut mengatakan bahwa pengaruh BI Rate terhadap kredit bertengan teori suku bunga. Dalam studi (Suwandi, 2016) menemukan bahwa ada pengaruh positif antara BI Rate terhadap kredit. Padahal dalam teori suku bunga pengaruh antara BI Rate terhadap kredit adalah negatif.

Dalam paparan penelitian ini terkait pengaruh BI Rate terhadap kredit disebut rigiditas atau “kekakuan” antara BI Rate terhadap Kredit. Kekakuan hubungan tersebut tecermin bahwa tidak tertransmisikan dengan antara suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia, BI Rate, terhadap kredit.

Dalam temuan (Suwandi, 2016) dijelaskan perilaku anomaly suku bunga tersebut. Dia menjelaskan bahwa faktor utama terjadinya anomaly tersebut karena nasabah peminjam, khususnya nasabah BRI cabang Marauke, berperilaku tidak sensitif terhadap kenaikan suku bunga kredit. Yang dominan perilaku nasabah tersebut adalah terkait syarat-syarat untuk mendapatkan kredit tersebut bukan kepada kenaikan suku bunga kredit perbankan. Maka-nya ketika suku bunga kredit naik maka respons dari nasabah tersebut tetap meningkat permintaan kredit. Yang menjadi pertimbangan nasabah bukan faktor bunga tetapi kemudahan dalam mendapatkan kredit tersebut.

Faktor lain menurut (Suwandi, 2016) terjadinya anomaly perilaku suku bunga tersebut adalah prospek perekonomian. Bagi nasabah usaha kredit menengah kecil (UMKM) kenaikan suku bunga kredit 1-2 persen tidak masalah bagi nasabah UMKM tersebut dibandingkan dengan hasil-hasil keuntungan-keuntungan yang diperoleh nasabah tersebut saat terjadi prospek ekonomi yang bagus. Dalam hal ini nasabah tidak mau kehilangan prospek bisnis kendati ada kenaikan suku bunga kredit yang signifikan.

Dalam paparan terakhir analisis (Suwandi, 2016) terkait perilaku anomaly suku bunga ini adalah perilaku dari pelaku perbankan yang tetap memanfaatkan kenaikan dana pihak ketiga atau DPK akibat kenaikan suku bunga DPK, khususnya simpanan tabungan dan deposito. Ketika suku bunga BI Rate naik maka perbankan merespons dengan menaikkan suku bunga tabungan dan deposito. Dengan demikian ada tambahan dana DPK karena kenaikan suku bunga DPK tersebut. Meningkatnya tambahan DPK perbankan itu direspons kembali oleh perbankan dengan meningkatkan penyaluran dana tersebut dalam bentuk kredit. Dalam hal ini bukannya menurunkan penyaluran kredit malahan meningkatkan penyaluran kredit.

Akibat perilaku perbankan yang mau respons panduan Bank Indonesia tentang arah kebijakan moneter, terkait pemberlakuan BI Rate tersebut, akan meningkatkan risiko perbankan dan perekonomian kita. Terkait penjelasan risiko bagi industri perbankan dan bagi perekonomian kita sudah dijelaskan di atas. Yang diharapkan ke depan, Bank Indonesia sudah harus mendesak mempelajari kekakuan perilaku kebijakan moneter nya terhadap penyaluran kredit perbankan. Selain memetakan permasalahan kekakuan atau anomali suku bunga di Indonesia juga mencari solusi kekakuan perilaku kebijakan moneter Bank Indonesia. Dengan demikian diharapkan risiko krisis perbankan dan krisis ekonomi seperti tahun 1998 dapat dikurangi drastis. Hal ini menjadi pekerjaan berat atau tantangan bagi Bank Indonesia dalam memperbaiki efektivitas kebijakan moneternya.

Selain studi (Siahaan, 2019) dan studi (Suwandi, 2016), ada berapa studi lagi yang sebelumnya menemukan terdapat positif dan signifikan pengaruh BI Rate terhadap penyaluran kredit perbankan, antara lain, (Sari, 2013), (Darmawan, 2017), dan (Pratiwi & Prajanto, 2020).

V.KESIMPULAN

1. Terdapat positif dan signifikan pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap penyaluran kredit perbankan Indonesia dalam riset ini. Dan mayoritas studi-studi yang terkait pengaruh DPK terhadap kredit menemukan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap kredit.
2. Terdapat positif dan signifikan pengaruh BI Rate terhadap penyaluran kredit dalam riset ini. Dalam teorinya bahwa ketika suku bunga bank sentral menaikkan suku bunganya maka seharusnya perbankan menurunkan penyaluran kreditnya karena adanya kenaikan suku bunga pendanaan atau cost of fund atau suku bunga kredit. Sebaiknya, ketika bank sentral menurunkan suku bunganya maka perbankan meningkatkan penyaluran kreditnya karena ada penurunan suku bunga pendanaan atau cost of fund. Tapi nyata dalam industri perbankan di Indonesia, ketika ada kenaikan suku bunga BI Rate malahan penyaluran kredit meningkat dan ketika ada penurunan suku bunga BI Rate malahan menurunkan penyaluran kredit. Dalam hal terjadi perilaku kekakuan atau anomali dari kebijakan moneter dari Bank Indonesia.

<https://doi.org/10.33087/jiubj.v2i1i.1183>

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. (2013). Pengaruh Inflasi, BI Rate, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada 10 Bank Terbesar di Indonesia Berdasarkan Kredit). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Darmawan, A. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia Tahun 2010-2015. *Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(4), 301–310.
- Ferdyan, N. A. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi (Studi Empiris pada Bank BUMN). 2010(0510230132).
- Gift, V., Putro, T., & Mayes, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Provinsi Riau Tahun 2006-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 768–782.
- Kasmir. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Melinda, V., Velicia, V., Lau, K., & Khairani, R. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan Dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 34.
- Natanael, K. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR, ROA dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Pertumbuhan Kredit (Studi Pada Bank Milik Pemerintah Tahun 2004-2009. Universitas Diponegoro.
- Oktaviani. (2012). Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2008-2011). Universitas Diponegoro Semarang.
- Pratama, B. A. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2005-20009) (Vol. 2, Issue 1). Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, R. D., & Prajanto, A. (2020). Faktor Internal dan Eksternal Sebagai Determinan Peningkatan Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 16–26.
<https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3133>
- Pujiyanti. (2010). Analisis Pengaruh Modal Bank Umum, Dana Pihak Ketiga, Dan Suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Pada Bank Umum (Tahun 2001:3-2009:5).
- Santoso, S. (2018). *Menguasai SPSS Versi 25*. KOMPAS GRAMEDIA.
- Sari, G. N. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank

Umum di Indonesia (Periode 2008.1 – 2012.2). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 931–941.

Siagian, S. (2020a). Faktor-Faktor Mempengaruhi (NPL) Don Performing Loan I Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 364–373. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8702>

Siagian, S. (2020b). Pengaruh Pengucuran Kredit Dan Kredit Bermasalah Terhadap Rasio Kecukupan Modal (CAR) Pada Perbankan Nasional. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)*, 18(2), 193–200.

Siahaan, N. H. (2019). Analisis Pengaruh DPK, LDR, NPL Dan Suku Bunga SBI Oleh Bank Umum Terhadap Penyaluran Kredit Di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.

Sitanggang, S. H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Universitas Sumatera Utara.

Sujarweni, V. Wiratna & Utami, L. R. (2019). *THE MASTER BOOK OF SPSS* (p. 328). Penerbit STARUP.

Suwandi. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Pinjaman Di Bank BRI Cabang Merauke. Universitas Terbuka.